

DESENTRALISASI FISKAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI : SEBELUM DAN SESUDAH ERA DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA

Bayu Kharisma

Fakultas Ekonomi, Universitas Padjajaran
Jalan Dipati Ukur No.35 Bandung, Jawa Barat, Indonesia
E-mail korespondensi: bayu_kharisma@yahoo.com

Naskah diterima: Desember 2012; disetujui: September 2013

Abstract: *The regional autonomy in Indonesia gives the implication to the shift of authority between the center and local government in many sectors. The regional autonomy also makes the decentralization that related with the local financing management, the economy planning including the local planning and other planning that shifted from the central government to the local government. The study aims to know the effect of fiscal decentralization from the income and spending aspect towards the local economic development in Indonesia (gas and oil nationally). The method analysis in this study is the panel data from 1995-2000 and 2001-2004. The result shows that before decentralization on the year of 1995-2000, the fiscal decentralization whether from income or spending aspect has negative influence to the economy growth. Coming into decentralization from 2001-2004, the fiscal decentralization on supporting the economy development, whether from government income or spending is increasing. But the fiscal decentralization is exceeding the spending aspect compare to the income, whether in national level, with oil and gas or without oil and gas, inside Java or outside Java.*

Keywords: *regional autonomy; fiscal decentralization; panel data; economic growth*
JEL Classification: *E62, O23, O11*

Abstrak: *Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia membawa implikasi pada pelimpahan kewenangan antara pusat dan daerah dalam berbagai bidang. Adanya otonomi daerah maka terjadi desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi termasuk menyusun program-program pembangunan daerah dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi di Indonesia (nasional dengan migas dan tanpa migas, di Jawa dan di luar Jawa). Metode analisis yang digunakan dalam penulisan studi ini menggunakan data panel secara terpisah pada periode 1995-2000 dan 2001-2004. Hasil analisa menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan era desentralisasi periode 1995-2000, pengaruh desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan dan pengeluaran berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, baik untuk tingkat nasional dengan migas dan tanpa migas, di Jawa dan di luar Jawa. Memasuki era desentralisasi selama kurun waktu 2001-2004, pengaruh desentralisasi fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik melalui sisi penerimaan maupun pengeluaran mengalami peningkatan dibandingkan sebelum era desentralisasi. Namun pengaruh desentralisasi fiskal tersebut jauh lebih besar melalui sisi pengeluaran dibandingkan sisi penerimaan daerah, baik di tingkat nasional dengan migas dan tanpa migas, di Jawa maupun di luar Jawa.*

Kata kunci: *otonomi daerah; desentralisasi fiskal; data panel; pertumbuhan ekonomi.*
Klasifikasi JEL: *E62, O23, O11*

PENDAHULUAN

Desentralisasi secara umum menggambarkan adanya transfer kompetensi dan kemampuan serta tanggung jawab untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik dari Pemerintah Pusat ke Daerah yang lebih baik. Selain itu, desentralisasi dapat diartikan sebagai pemindahan fungsi-fungsi dan sumber daya dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Dalam hal fungsi, di mana penyediaan fungsi atau pelayanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat harus memberikan manfaat dalam lingkup perekonomian yang lebih luas. Namun di sisi lain, Pemerintah Daerah harus mampu menyediakan barang publik yang bersifat lokal. Oleh karena itu, dengan adanya desentralisasi diharapkan Pemerintah Daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik lebih demokratis. Proses desentralisasi dapat diwujudkan antara lain dengan pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, menggali potensi penerimaan daerah secara mandiri, terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, kepala daerah yang dipilih oleh legislatif di daerah dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat (Sidik., 2002:1).

Timbulnya keinginan diterapkannya proses desentralisasi di berbagai negara di dunia, khususnya di negara-negara berkembang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain latar belakang atau pengalaman suatu negara, peranannya dalam globalisasi dunia, kemunduran dalam pembangunan ekonomi, tuntutan terhadap perubahan tingkat pelayanan masyarakat, tanda-tanda adanya disintegrasi diberbagai negara serta banyaknya kegagalan yang dialami oleh pemerintahan sentralistik dalam memberikan pelayanan masyarakat yang efektif.

Pada tahun 2001 Indonesia telah memasuki era baru dalam tata pemerintahan, yaitu pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya kondisi tersebut maka pada saat itulah UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah mulai diberlakukan. Pelaksanaan otonomi daerah

dalam kedua UU tersebut pada dasarnya merupakan tanggapan terhadap aspirasi adanya keinginan format baru mengenai hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia yang berimplikasi pada pelimpahan kewenangan dalam berbagai bidang.

Sejalan dengan pembagian kewenangan tersebut maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dibebankan melalui APBD, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan. Di samping itu, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi maka Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak atau retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta transfer keuangan (*grant*) atau sering disebut dana perimbangan.

Hal penting yang tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999 adalah pembagian kewenangan dan fungsi (*power sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sementara itu, UU No. 25 Tahun 1999 menyangkut masalah desentralisasi fiskal, yaitu pengaturan pembagian antara sumber daya keuangan (*financial sharing*) antara Pusat dan Daerah merupakan konsekuensi logis dari adanya pembagian kewenangan tersebut. UU Nomor 25 Tahun 1999 yang berisi tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah didesain dengan menggunakan prinsip *money follows function* atau "uang mengikuti kewenangan". Artinya, jika kewenangan dilimpahkan ke Daerah maka uang untuk mengelola kewenangan pun harus dilimpahkan ke Daerah.

Dengan dilaksanakannya desentralisasi fiskal di Indonesia maka Pemerintah Daerah harus mampu berperan dalam mengelola keuangannya secara mandiri sehingga seluruh potensi harus dioptimalkan melalui mekanisme perencanaan yang efektif dan efisien. Hal ini menjadi tantangan bagi seluruh wilayah otonom di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Dengan demikian, peran

Pemerintah Daerah beserta partisipasi masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif dalam membangun daerahnya, termasuk menggali potensi sumber-sumber keuangan daerahnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Pembangunan ekonomi daerah pada dasarnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip otonomi daerah. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dari masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dalam upaya mendukung penyelenggaraan otonomi daerah maka penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah harus dilakukan secara nyata dan bertanggung jawab serta diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil.

Desentralisasi pada dasarnya tidak mudah untuk didefinisikan, karena menyangkut berbagai dimensi yang beragam, khususnya menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan serta pembangunan sosial ekonomi. Secara umum, desentralisasi terdiri dari desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administratif (*administrative decentralization*), desentralisasi ekonomi (*economic of market decentralization*) dan desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*). (Kälin, 2001:6)

Desentralisasi politik bertujuan meningkatkan keikutsertaan atau partisipasi aktif dari masyarakat, khususnya masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan secara politis. Hal itu menyiratkan bahwa otoritas lokal yang dipilih harus lebih bertanggung jawab terhadap masyarakat lokal yang telah memilihnya dan mereka harus lebih baik merepresentasikan kepentingan lokal dalam pengambilan keputusan politis.

Desentralisasi administratif yaitu pelimpahan wewenang yang dimaksudkan untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab dan sumber-sumber keuangan untuk menyediakan pelayanan publik. Pelimpahan tang-

gung jawab tersebut menyangkut perencanaan, pendanaan dan pelimpahan manajemen fungsi-fungsi pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada aparatnya di daerah, tingkat pemerintahan yang lebih rendah, badan otoritas tertentu atau perusahaan tertentu. Desentralisasi administratif pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bentuk, antara lain yaitu:

1) Dekonsentrasi (*deconcentration*). Adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada pejabat yang berada dalam garis hierarki dengan Pemerintah Pusat di daerah.

2) Devolusi (*devolution*). Adalah pelimpahan wewenang kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah dalam bidang keuangan atau tugas pemerintahan, dimana pihak Pemerintah Daerah mendapat diskresi atau kewenangan yang tidak dikontrol oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal tertentu, di mana Pemerintah Pusat akan memberikan supervisi secara tidak langsung atas pelaksanaan tugas tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, Pemerintah Daerah memiliki wilayah administrasi yang jelas dan legal serta diberikan kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan fungsi publik, termasuk dalam menggali sumber-sumber penerimaan serta mengatur penggunaannya. Dekonsentrasi dan devolusi dari konsepsi pemikiran hierarki organisasi dikenal sebagai *distributed institutional monopoly of administrative decentralization*.

3) Pendelegasian (*delegation or institutional pluralism*). Adalah pelimpahan wewenang untuk tugas tertentu kepada organisasi yang berada diluar struktur birokrasi regular dan dikontrol secara tidak langsung oleh Pemerintah Pusat. Pendelegasian wewenang ini pada dasarnya diatur dengan ketentuan perundang-undangan. Pihak yang menerima wewenang tersebut mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pendelegasian tersebut meskipun wewenang terakhir tetap pada pihak pemberi wewenang (*sovereign authority*).

Desentralisasi ekonomi merujuk pada transfer fungsi pemerintah kepada sektor swasta. Artinya, penugasan yang sebelumnya ditangani oleh pemerintah diserahkan kepada perusahaan swasta, kepentingan kelompok, organisasi yang sukarela dan organisasi bukan pemerintah lainnya. Ada dua hal utama penting dalam desentralisasi ekonomi yaitu:

1) Privatisasi atau transfer kewajiban secara

parsial ataupun sepenuhnya untuk produksi barang dan jasa yang spesifik dari pemerintah ke sektor swasta.

2) Deregulasi atau mengurangi hambatan-hambatan bersifat legal yang dapat menghambat sektor swasta untuk memproduksi barang dan jasa, dengan kata lain berusaha menciptakan iklim persaingan antara aktor swasta dalam area yang sebelumnya didominasi oleh pelayanan pemerintah atau monopoli dari perusahaan pemerintah.

Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi, dimana apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik maka harus mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat berupa subsidi/bantuan maupun pinjaman dari Pemerintah Pusat serta sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Pemerintah pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama, antara lain adalah fungsi distribusi, alokasi dan stabilisasi (Musgrave and Musgrave, 1985:6). Fungsi alokasi adalah peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber-sumber daya ekonomi agar tercipta secara efisien, yaitu adanya peran pemerintah dalam penyediaan barang untuk barang maupun jasa yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli atau sistem pasar karena adanya kegagalan pasar (*market failure*). Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan barang-barang tersebut (dalam hal ini barang publik). Fungsi distribusi adalah peranan pemerintah dalam mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin adanya keadilan atau "*fair*" dalam pengaturan distribusi pendapatan. Fungsi stabilisasi merujuk pada tindakan pemerintah dalam mempengaruhi keseluruhan tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan harga. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan kebijakan anggaran (*budget policy*) untuk mengurangi pengangguran, derajat kestabilan harga yang beralasan (*reasonable*) dan tingkat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Fungsi distribusi dan fungsi stabilitas pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintah Daerah

yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi tersebut dimaksudkan untuk landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah secara proporsional, transparan, demokratis dan adil dengan memperhatikan kondisi, potensi dan kebutuhan daerah.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik jika didukung faktor-faktor sebagai berikut (Sidik, 2002:2). *Pertama*, adanya peran Pemerintah Pusat yang intensif dalam melakukan pengawasan dan *enforcement*. *Kedua*, terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, khususnya dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah. *Ketiga*, stabilitas politik yang kondusif. *Keempat*, proses pengambilan keputusan di daerah harus demokratis, dimana pengambilan keputusan tentang manfaat dan biaya harus transparan serta pihak-pihak yang terkait memiliki kesempatan mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut. *Kelima*, desain kebijakan dari keputusan yang diambil sepenuhnya merupakan tanggung jawab masyarakat setempat dengan dukungan institusi dan kapasitas manajerial yang diinginkan sesuai dengan permintaan daerah. *Keenam*, kualitas sumberdaya manusia yang kapabel dalam menggantikan peran yang sebelumnya merupakan Pemerintah Pusat.

Adanya ketertarikan yang tinggi dalam menjalankan proses desentralisasi fiskal disebabkan beberapa faktor antara lain, *Pertama*, diyakini bahwa desentralisasi fiskal sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran publik. *Kedua*, adanya desakan untuk melakukan desentralisasi dapat dilihat sebagai reaksi kegagalan birokrasi pemerintah sentralistik dengan regim politik berbeda yang terjadi di negara berkembang dan negara-negara transisi, desentralisasi fiskal sebagai mekanisme untuk membuat suatu kebijakan lebih responsif terhadap apa yang dibutuhkan daerah dan melibatkan penduduk di daerah dalam melaksanakan proses pemerintahan yang demokratis. Di samping itu, desentralisasi juga dapat dilihat sebagai jalan untuk pergeseran wewenang dengan menggeser otoritas fiskal

kepada Pemerintah Daerah (Oates, 1993:273).

Namun, di satu sisi desentralisasi fiskal dapat berpengaruh buruk terhadap kondisi suatu negara, khususnya di negara berkembang. *Pertama*, desentralisasi fiskal akan mendorong ke arah ketidakstabilan makroekonomi, dimana hal ini disebabkan karena desentralisasi fiskal secara tidak langsung dapat mengurangi dasar pajak dan pembelanjaan yang digunakan Pemerintah Pusat dalam melakukan kebijakan stabilisasi melalui kebijakan anggaran. *Kedua*, implementasi kebijakan desentralisasi yang didesain buruk dapat menciptakan insentif Pemerintah Daerah untuk membelanjakan dan meminjam dana secara berlebihan yang dapat mengarah pada ketidakstabilan makroekonomi. *Ketiga*, suatu kebijakan desentralisasi tidak berjalan dengan baik jika diterapkan pada birokrasi yang korupsi, tidak stabilnya kondisi politik, administrasi, institusi dan kemampuan manajerial daerah yang tidak memadai (*capable*). *Keempat*, preferensi para pemilih (*voters*) di daerah tidak mencerminkan preferensi daerahnya, di mana hal ini seringkali dipengaruhi oleh faktor politik.

Ada tiga faktor yang harus diperhatikan dari desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan di daerah (Bird and Vaillancourt, 2000:7). *Pertama*, desentralisasi fiskal berarti adanya pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkungan Pemerintah Pusat ke instansi vertikal di daerah. *Kedua*, delegasi berhubungan dengan suatu situasi, yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama Pemerintah Pusat. *Ketiga*, devolusi (pelimpahan) berhubungan dengan situasi yang bukan saja implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan, khususnya yang bertempat di daerah.

Desentralisasi fiskal dapat dinilai secara jelas, namun hal itu sebagian tergantung pada apakah yang sudah dilakukan lebih bersifat dekonsentrasi, delegasi atau devolusi dan kebijakan politik yang bersifat dari atas ke bawah (*top down*) atau dari bawah ke atas (*bottom up*). Pendekatan desentralisasi fiskal dari bawah ke atas umumnya selain menekankan nilai ekonomi, juga nilai politik. Oleh karena itu, pendekatan tersebut lebih mengangan-

dung manfaat sisi ekonomi maupun politik. Desentralisasi tidak hanya menghasilkan pelayanan yang efisien dan adil melalui pengetahuan lokal, namun di sisi lain akan mendorong partisipasi demokrasi yang lebih besar. Dengan demikian, hasil yang diharapkan adalah terciptanya dukungan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah serta dapat memperbaiki stabilitas politik. Apabila manfaat ini ditambah dengan sisi lain, misalnya seperti peningkatan mobilisasi sumber-sumber dan pengurangan tekanan atas keuangan pusat, peningkatan akuntabilitas dan peningkatan respon serta tanggung jawab pemerintah maka desentralisasi fiskal merupakan suatu yang bermanfaat.

Desentralisasi fiskal secara tidak langsung mempunyai hubungan terhadap pertumbuhan ekonomi karena dapat meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya (Bird and Vaillancourt, 2000:8). Hal ini disebabkan (1) Pemerintah Daerah memiliki keuntungan yang lebih baik dibandingkan Pemerintah Pusat dalam memberikan pelayanan dan penyediaan barang-barang publik yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan-kebutuhan daerah itu sendiri. (2) Menstimulus Pemerintah Daerah untuk lebih kreatif, inovatif dan akuntabilitas terhadap daerahnya dalam upaya merespon kebutuhan masyarakat dan upaya meningkatkan kemakmuran di daerah melalui optimalisasi sumber daya yang ada secara efisien dan mengurangi pemborosan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengembangkan seluruh potensi yang ada, baik sumber daya alam maupun sumberdaya manusia untuk meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat daerah itu sendiri yang secara tidak langsung berdampak pada meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi. (3) Adanya kebijakan desentralisasi akan ditandai dengan penyediaan infrastruktur di daerah yang secara tidak langsung sangat sensitif terhadap kondisi regional atau daerah, dimana lebih efektif dalam mendorong pembangunan ekonomi daripada kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat yang seringkali mengabaikan adanya perbedaan geografis antardaerah.

Esensi mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi fiskal setidaknya mempunyai tiga pertimbangan. *Pertama*, pertumbuhan dilihat sebagai sesuatu yang

objektif dari desentralisasi fiskal dan efisiensi dalam alokasi sumberdaya dalam sektor publik. *Kedua*, secara eksplisit bahwa pemerintah berusaha untuk mengadopsi berbagai kebijakan-kebijakan untuk mendorong ke arah peningkatan dalam pendapatan per kapita. Ketiga, pertumbuhan per kapita relatif lebih mudah untuk diukur dan diinterpretasikan dibanding indikator-indikator ekonomi lainnya.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi di tingkat nasional dengan migas dan tanpa migas serta di Jawa dan luar Jawa selama periode 1995-2004.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi Model

Studi ini membahas pengaruh desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi. Model yang digunakan dalam studi ini merujuk pada model-model yang telah ada dengan berbagai tambahan dari sumber-sumber lainnya serta beberapa modifikasi (Jin and Heng-fu Zou, 2005: 1047-1064). Dasar teori yang digunakan untuk membahas pengaruh anggaran Pemerintah Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah mengadopsi *production-function based*, yaitu fungsi produksi Cobb-Douglas.

Apabila diasumsikan suatu daerah dalam memproduksi output (Y) dengan menggunakan stok modal (K) dan tenaga kerja (L) maka dapat dituliskan berikut:

$$Y_{it} = A_{it} K_{it}^{\alpha} L_{it}^{1-\alpha} U_{it} \quad 1)$$

di mana Y adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); K adalah stok modal; L adalah jumlah tenaga kerja; A adalah tingkat kemajuan teknologi, α dan $1-\alpha$ adalah elastisitas *output* terhadap modal dan tenaga kerja dengan nilai $0 < \alpha < 1$ dan $0 < 1 - \alpha < 1$, *i* dan *t* adalah indeks provinsi dan indeks waktu dan U adalah galat. Selain itu, diasumsikan fungsi produksi memiliki pengembalian skala konstan sehingga penjumlahan α dan $1 - \alpha$ adalah satu. Asumsi

yang digunakan pada model tersebut adalah total faktor produksi mempunyai bentuk *log* $A_{it} = a_i + b_t$ yang merupakan *fixed effect* dari masing-masing provinsi dengan indeks *i* dan pertumbuhan produktivitas Indonesia secara keseluruhan dengan indeks *t*. Jika fungsi produksi Cobb-Douglas tersebut dibagi dengan tenaga kerja maka dapat diuraikan berikut ini:

$$(Y/L)_{it} = (A/L)_{it} (K/L)_{it}^{\alpha} (L/L)_{it}^{1-\alpha} U_{it} \quad 2)$$

dari persamaan (2) apabila dirubah ke dalam *log linier* maka tingkat output per kapita dapat diuraikan sebagai berikut:

$$\text{Log}(Y/L)_{it} = \text{Log}(A/L)_{it} + \alpha \text{Log}(K/L)_{it} + \text{Log}U_{it} \quad 3)$$

$$\dot{g}_{it} = \dot{y} = \dot{A}_{it} + \alpha \dot{k}_{it} + u_{it} \quad 4)$$

dalam persamaan (4), laju pertumbuhan *output* per kapita tergantung pada dua faktor, antara lain laju pertumbuhan modal per kapita dan tingkat kemajuan teknologi (*rate of technological progress*). Dalam hal ini, \dot{A}_{it} tidak hanya menggambarkan tingkat kemajuan teknologi, namun juga mencerminkan perbedaan dalam kelimpahan sumberdaya (*resource endowments*) dan institusi antardaerah dari waktu ke waktu, seperti halnya di dalam karakteristik-karakteristik spesifik lain di suatu wilayah yang tidak bisa diamati.

Pada studi ini, diasumsikan bahwa \dot{A}_{it} bergantung pada dua variabel. Variabel pertama adalah desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan dan pengeluaran, sedangkan variabel kedua adalah variabel kontrol yang merupakan perbedaan daerah dalam kelimpahan sumber daya dan institusi antardaerah, antara lain adalah pertumbuhan penduduk, pajak daerah dan keterbukaan daerah (*degree of openness*). Sementara itu, *proxy* untuk modal per kapita menggunakan pembentukan modal tetap domestik bruto riil per kapita. Dalam penulisan studi ini, model diestimasi menggunakan data panel secara terpisah pada periode 1995-2000 dan

2001-2004 yang mempunyai bentuk sebagai berikut:

1) Model Hubungan Desentralisasi Fiskal dari Sisi Penerimaan dan Pengeluaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi:

$$\ln Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \ln DFX_{it} + \alpha_2 \ln DFY_{it} + \alpha_3 \ln INV_{it} + \alpha_4 \ln OPEN_{it} + \alpha_5 \ln GOP_{it} + u_{it} \quad 5)$$

2) Model Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi:

$$\ln Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \ln PAD_{it} + \alpha_2 \ln DPER_{it} + \alpha_3 \ln INV_{it} + \alpha_4 \ln OPEN_{it} + \alpha_5 \ln GOP_{it} + u_{it} \quad 6)$$

3) Model Hubungan Pengeluaran Rutin dan

$$\ln Y_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \ln RUTIN_{it} + \alpha_2 \ln PEMB_{it} + \alpha_3 \ln INV_{it} + \alpha_4 \ln OPEN_{it} + \alpha_5 \ln GOP_{it} + \alpha_6 \ln TAX_{it} + u_{it} \quad 7)$$

Keterangan: Y_{it} adalah PDRB riil per kapita dari provinsi i pada tahun t ; DFX_{it} adalah Desentralisasi Fiskal dari sisi penerimaan (rasio total PAD terhadap total PAD dan total penerimaan dalam negeri) riil per kapita dari provinsi i pada tahun t ; DFY_{it} adalah Desentralisasi Fiskal dari sisi pengeluaran (rasio total pengeluaran daerah terhadap total pengeluaran daerah dan total pengeluaran pusat)¹ riil per kapita dari provinsi i pada tahun t ; INV_{it} adalah Investasi riil per kapita dari provinsi i pada tahun t ; $OPEN_{it}$ adalah keterbukaan daerah (rasio ekspor dan impor daerah terhadap PDRB) riil dari provinsi i pada tahun t ; $GPOP_{it}$ adalah Pertumbuhan penduduk dari provinsi i pada tahun t ; PAD_{it} adalah Pendapatan Asli Daerah (rasio PAD terhadap total penerimaan daerah) dari provinsi i pada tahun t ; $DAPER_{it}$ adalah Dana Perimbangan (rasio dana perimbangan terhadap total penerimaan daerah) dari provinsi i pada tahun t ; $RUTIN_{it}$ adalah Belanja Rutin (rasio belanja rutin terhadap total pengeluaran daerah) dari provinsi i pada tahun t ; $PEMB_{it}$ adalah Belanja Pembangunan

¹ tanpa memperhitungkan angsuran pinjaman atau hutang dan bunga

(rasio belanja pembangunan terhadap total pengeluaran daerah) dari provinsi i pada tahun t . u_{it} adalah *error term*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam studi ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, bagian pertama adalah melihat pengaruh desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi di Indonesia (di tingkat nasional dengan migas dan tanpa migas, di Jawa dan di luar Jawa), bagian kedua melihat pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketiga adalah melihat pengaruh belanja rutin dan pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semua model menggunakan data panel yang terdiri dari 26 provinsi (provinsi yang mengalami pemekaran diagregasikan dengan provinsi induknya) yang merupakan data *cross section* dan 10 tahun (1995-2004) data *time series* sehingga total obser-vasi data panel adalah 260. Dalam melakukan pemilihan pendekatan panel data yang paling cocok untuk mengestimasi semua model maka dilakukan uji Hausman (*Hausman test*). Berdasarkan hasil uji Hausman dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang paling cocok dengan karakteristik data adalah model efek tetap (*fixed effect*). Hasil pengolahan data secara ringkas untuk semua model dapat dilihat pada tabel 1, 2, dan 3 dalam Lampiran.

Analisis Statistik dan Ekonometrik

Secara umum model data panel yang digunakan untuk melihat dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Indonesia memberikan hasil yang baik secara teori ekonomi dan teori keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari tanda koefisien yang arah dan besarnya beresuaian dengan teori ekonomi dan keuangan daerah.

Berdasarkan hasil estimasi terhadap semua model di atas, terlihat bahwa secara umum hampir semua variabel signifikan pada tingkat kepercayaan 99%, 95% dan 90%, meskipun masih ada beberapa variabel yang tidak signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai t-hitung

lebih besar dari nilai t -tabel. Artinya, masing-masing variabel yang diuji berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengujian tersebut dilakukan dengan membandingkan nilai t -hitung dengan nilai kritis yang diperoleh dari t -tabel. Apabila nilai t -hitung $>$ t -tabel maka hipotesis H_0 ditolak. Sebaliknya, jika nilai t -hitung $<$ t -tabel maka hipotesis H_0 diterima.

Sementara itu, hasil estimasi juga menunjukkan bahwa nilai *probability F-statistic* ($p = 0,0000$) signifikan pada tingkat kepercayaan 99%. Hal ini berarti bahwa secara bersama-sama variabel bebas pada semua model tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas pada tingkat kepercayaan 99%. Selanjutnya pada tahap akhir uji statistik adalah melihat nilai *adjusted R²*. Hasil estimasi yang telah dilakukan diperoleh bahwa nilai *adjusted R²* semua model adalah 0.999. Hal ini menunjukkan bahwa 99,9% variasi dalam variabel tidak bebas mampu dijelaskan oleh variasi semua variabel bebas yang terdapat dalam model, sedangkan sisanya sebesar 0,001% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Pada pengujian multikolinier, berdasarkan hasil estimasi tidak terdapat multikolinearitas antara variabel di dalam model. Hal ini diperlihatkan dengan uji *correlation matrix* yang menunjukkan tidak ada gejala *multicollinearity* dalam model, karena semua nilai korelasi masing-masing variabel di bawah 80%. Artinya, tidak ada hubungan antara variabel bebas dalam model. Dengan demikian diharapkan masing-masing variabel bebas dapat memberikan pengaruh yang murni terhadap variabel tidak bebas.

Pada studi ini, gejala heteroskedastis sudah diperbaiki secara langsung dengan melakukan koreksi *standard error (white heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance)*, sehingga diharapkan tidak ada korelasi antara *error* dengan variabel bebas dalam model serta perilaku *error term* tidak memiliki pola yang sistematis. Dengan mengacu pada nilai Durbin-Watson, semua model secara umum tidak terdapat indikasi adanya korelasi serial (*Autocorrelation*), di mana nilai DW dalam semua persamaan di atas mendekati nilai 2. Selain itu, dalam metode *fixed effect* diasumsikan dapat

mengatasi masalah korelasi serial (Gujarati, 2003:646). Dengan demikian, secara umum model yang digunakan sudah memenuhi asumsi BLUE (*best linier unbiased estimator*) diharapkan bahwa nilai yang dihasilkan dapat menunjukkan nilai yang baik, efisien dan tidak bias serta dapat menggambarkan pengaruh yang murni dari variabel bebas terhadap variabel tidak bebas sehingga layak dijadikan sebagai dasar analisis.

Analisis Ekonomi

1) Desentralisasi Fiskal Sisi Penerimaan dan Pengeluaran.

Desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan dan pengeluaran sebelum pelaksanaan desentralisasi tahun 1995-2000, berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun pengaruh dari sisi pengeluaran lebih berpengaruh besar dibandingkan sisi penerimaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, baik di tingkat nasional dengan migas dan tanpa migas, di Jawa maupun di luar Jawa. Berdasarkan hasil estimasi, menunjukkan bahwa pengaruh desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh negatif. Artinya, Pemerintah Daerah belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan dan memobilisasi anggaran penerimaan dan pengeluaran daerah yang ada. Hal ini dikarenakan besarnya peran atau dominasi Pemerintah Pusat dalam menjalankan sistem pemerintahan, termasuk dalam mengatur dan mengendalikan anggaran Pemerintah Daerah, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Pola pendekatan sentralistik dan seragam (*uniform*) yang dikembangkan Pemerintah Pusat sejak orde baru telah menurunkan atau bahkan meniadakan inisiatif dan kreativitas daerah, dimana Pemerintah Daerah kurang diberikan keleluasaan (*local discretion*) untuk menentukan kebijakan daerahnya sendiri, termasuk rendahnya wewenang dan tugas dalam membiayai pengeluaran daerahnya, di mana belanja daerah hampir sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, masih terbatasnya kewenangan dalam memanfaatkan dan memungut pendapatan daerahnya sendiri, khususnya dari pajak dan retribusi. Hal ini berimplikasi

pada masih rendahnya peran anggaran Pemerintah Daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, peran anggaran Pemerintah Pusat dari sisi penerimaan dan pengeluaran lebih efisien dan efektif dibandingkan Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Memasuki era desentralisasi selama kurun waktu 2001-2004, pengaruh desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan sebelum era desentralisasi. Adanya peningkatan desentralisasi fiskal, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran disebabkan karena adanya kenaikan anggaran pemerintah daerah sejak pemberlakuan era desentralisasi. Hal ini sesuai dengan UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 serta UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Oleh karena itu, sejak pelaksanaan era desentralisasi peran anggaran Pemerintah Daerah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama dari sisi pengeluaran.

Pengaruh desentralisasi fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jauh lebih besar melalui sisi pengeluaran dibandingkan sisi penerimaan daerah. Hal ini disebabkan karena sejak memasuki pelaksanaan era desentralisasi, segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan dan tanggung jawab dalam penyediaan pelayanan publik dari pusat kewenangannya sudah dilimpahkan ke daerah. Dengan demikian, kondisi ini dapat mengakibatkan peningkatan alokasi dana belanja daerah yang jauh lebih besar, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Dengan demikian, adanya peningkatan alokasi dana belanja daerah yang lebih besar berdampak positif terhadap peran Pemerintah Daerah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui sisi pengeluaran.

Sementara itu, adanya pengaruh negatif desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan terhadap pertumbuhan ekonomi selama pelak-

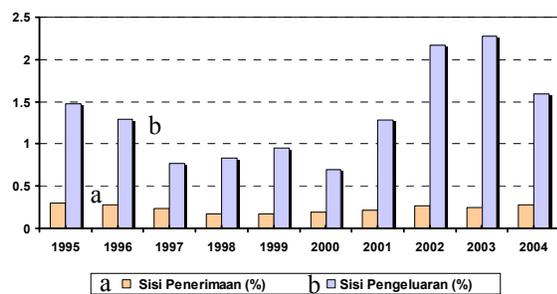
sanaan desentralisasi 2001-2004, baik di tingkat nasional dengan migas dan tanpa migas, di Jawa maupun di luar Jawa terkait dengan masalah penggalan sumber-sumber penerimaan daerah, antara lain dari pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah masih belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan sehingga pada akhirnya tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Tidak signifikannya peran pendapatan daerah dalam anggaran pemerintah daerah tidak lepas dari sistem pajak di Indonesia yang masih memberikan kewenangan penuh terhadap Pemerintah Pusat untuk mengumpulkan pajak-pajak yang potensial, seperti: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan bea masuk. Kenyataan yang terjadi selama ini distribusi kewenangan perpajakan antara daerah dan pusat sangat timpang, yaitu jumlah penerimaan pajak yang dipungut oleh daerah hanya 3,39% dari total penerimaan pajak (pajak pusat dan pajak daerah) (Sidik, 2002:8) Ketimpangan dalam penguasaan sumber-sumber penerimaan pajak tersebut memberikan petunjuk bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, khususnya dari sisi penerimaan sangat dikuasai atau didominasi oleh Pemerintah Pusat. Hal ini berdampak pada masih rendahnya peran anggaran Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sisi penerimaan.

Berdasarkan hasil estimasi, diperoleh bahwa desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan dan pengeluaran lebih berpengaruh besar di tingkat nasional tanpa migas (PDRB perkapita tanpa migas) dibandingkan dengan migas (PDRB perkapita total termasuk migas). Hal tersebut tercermin dari koefisien elastisitas desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan dan pengeluaran pada estimasi dengan PDRB per kapita tanpa migas yang lebih berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan estimasi menggunakan PDRB perkapita dengan migas. Hal ini mengindikasikan bahwa desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan minyak dan gas (migas) tidak banyak memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi

daerah. Dalam hal ini adanya ketidakadilan dalam hal kesejahteraan masyarakat yang merupakan dampak hasil dari kebijakan pemerataan pembangunan antardaerah yang dijalankan pemerintah orde baru, terutama melalui instrumen fiskal (*fiscal policy*) seperti transfer dari pusat, transfer antardaerah dan kebijakan lain terutama melalui berbagai skema Inpres, di mana kebijakan ini pada dasarnya dilakukan melalui sentralisasi keuangan (Unsfir, 2001). Pemerintah pusat langsung menarik ke pusat sebagian besar penerimaan pajak dan penerimaan sumber daya alam khususnya surplus dari minyak, gas dan hasil tambang yang hanya terkonsentrasi di beberapa provinsi kaya tersebut, sehingga pada akhirnya tidak ada hubungan yang kuat antara besarnya produksi migas di suatu provinsi dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini terlihat bahwa kesejahteraan masyarakat di daerah yang kaya sama atau bahkan lebih rendah dari masyarakat Indonesia pada umumnya.

Untuk melihat peran anggaran Pemerintah Daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran sebelum dan era desentralisasi selama 1995-2004 dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Desentralisasi Fiskal dari Sisi penerimaan dan Pengeluaran, Sebelum dan pada era desentralisasi 1995-2004

Pada gambar 1 menunjukkan bahwa peran anggaran Pemerintah daerah dari sisi pengeluaran jauh lebih besar dibandingkan sisi penerimaan. Hal ini mengindikasikan bahwa sisi pengeluaran di Indonesia pada dasarnya sudah mengarah ke arah desentralistik, khususnya sejak pelaksanaan desentralisasi tahun 2001, namun sisi penerimaan di Indonesia relatif masih sentralistik, baik sebelum maupun sesudah era desentralisasi.

2) Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan

Sebelum pelaksanaan era desentralisasi selama kurun waktu 1995-2000, pengaruh anggaran Pemerintah Daerah dari sisi dana perimbangan lebih berperan besar dibandingkan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, baik di tingkat nasional dengan migas dan tanpa migas, di Jawa maupun di luar Jawa. Adanya pengaruh dana perimbangan yang jauh lebih besar dibandingkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi disebabkan karena Pemerintah Daerah kurang diberikan kewenangan untuk memanfaatkan dan memungut pendapatan daerahnya sendiri serta sangat bergantung pada dana perimbangan dari Pusat. Oleh karena itu, kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran daerahnya masih rendah sehingga pengaruh anggaran Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui dana perimbangan jauh lebih besar dibandingkan pendapatan asli daerah (PAD).

Sementara itu, sejak era desentralisasi 2001-2004, pengaruh anggaran Pemerintah Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan asli daerah (PAD) mengalami peningkatan dibandingkan sebelum era desentralisasi. Sementara itu, pengaruh anggaran Pemerintah Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui dana perimbangan mengalami penurunan. Adanya penurunan peran dana perimbangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sejak pelaksanaan desentralisasi disebabkan paling tidak oleh dua hal. *Pertama*, masih besarnya porsi belanja rutin. Sejak desentralisasi, belanja untuk gaji pegawai meningkat cukup besar, termasuk gaji anggota DPRD. Sidik, *et.al.* (2002) menunjukkan bahwa perilaku *rent seeking* di daerah meningkatkan biaya dalam mengorganisasikan *rent based transfer* pada tingkat pemerintahan kabupaten/kota untuk memperkuat struktur kekuatan elit politik di daerah, sehingga sebagian besar dana perimbangan yang mengalir ke daerah hanya dinikmati oleh elit di daerah tersebut. *Kedua*, ada beberapa syarat kecukupan (*sufficient conditions*) yang belum dipenuhi oleh daerah, antara lain yang terkait dengan bagaimana proses

perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh daerah selama era desentralisasi ini. Apabila dana perimbangan yang mengalir ke daerah tidak dibarengi oleh proses perencanaan yang baik dengan prinsip partisipatif dari masyarakat dan tidak diimbangi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel maka dana yang besar tersebut tidak akan mempunyai dampak yang cukup berarti bagi perekonomian daerah tersebut karena hanya dinikmati oleh beberapa orang saja.

Sejak pelaksanaan desentralisasi selama kurun waktu 2001-2004, peran anggaran Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan asli daerah (PAD) jauh lebih kecil dibandingkan dana perimbangan. Hal ini disebabkan antara lain ; Pertama, relatif masih rendahnya basis pajak dan retribusi daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah. Rendahnya basis pajak dan retribusi ini bagi daerah yang secara tidak langsung memperkecil peranan pendapatan asli daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua, masih adanya ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan dari Pemerintah Pusat yang berimplikasi ketidakmauan Daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerahnya sehingga berdampak pada rendahnya penerimaan daerah dari pendapatan asli daerah. Ketiga, Kemampuan administrasi pemungutan di daerah cenderung masih rendah. Hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibiayai oleh biaya pungutan yang besar.² Keempat, selama kurun waktu pelaksanaan desentralisasi, beberapa provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia mengalami pemekaran, misalnya provinsi Bangka Belitung, Maluku Utara, Gorontalo dan Banten. Hal ini secara tidak langsung berdampak terhadap penurunan pendapatan asli daerah (PAD), khususnya bagi daerah induknya yang mengalami pemekaran tersebut (Rosalina, 2006:41). Kelima, banyaknya pemungutan dan penciptaan pajak dan retribusi baru yang berlebihan selama pelaksanaan era desentralisasi serta munculnya berbagai pungutan daerah yang masuk dalam kategori perda bermasalah sehingga menimbulkan

dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi (Lewis and Chakery, 2004a:2). Keenam, proyeksi penerimaan daerah pada umumnya hanya didasarkan pada pengalaman penerimaan tahun sebelumnya sehingga usaha untuk menggali potensi pendapatan asli daerah belum banyak dilakukan oleh daerah (Lewis and Chakery, 2004b:2). Ketujuh, selama awal pelaksanaan desentralisasi, pendapatan asli daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antardaerah yaitu kurang dari 10% hingga 50%, di mana sebagian besar daerah provinsi hanya dapat membiayai kebutuhan pengeluarannya kurang dari 10%. Demikian pula, distribusi pajak antar daerah juga sangat timpang karena basis pajak antardaerah sangat bervariasi (ratio PAD tertinggi dengan terendah mencapai 600). Terakhir, peranan pajak dan retribusi dalam pembiayaan daerah sangat bervariasi akibat adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya yang relatif mahal), dan kemampuan masyarakat, sehingga mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

Selain itu, pengaruh anggaran Pemerintah Daerah terhadap pertumbuhan daerah melalui dana perimbangan jauh lebih besar dibandingkan melalui pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini disebabkan karena pelaksanaan desentralisasi dirasakan masih relatif baru sehingga masih banyak daerah yang belum siap dalam melaksanakannya. Selain itu, masih banyak beberapa daerah yang memiliki potensi dan kapasitas serta sumber penerimaan terbatas namun dihadapkan pada pembiayaan belanja daerah yang cukup besar. Oleh karena itu, upaya untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan daerah dalam membiayai beban pengeluaran, mengurangi ketimpangan vertikal maupun horizontal serta untuk menambah pendapatan daerah maka peranan dana perimbangan (terutama dari DAU) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jauh lebih besar dibandingkan melalui PAD.

Pada komposisi penerimaan daerah, pendapatan asli daerah (PAD) lebih kuat pengaruhnya dibandingkan dana perimbangan di tingkat nasional tanpa migas dibandingkan nasional dengan migas. Hal ini mengindikasikan

² Laporan Studi Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Keuangan Daerah di Indonesia. LPEM Universitas Indonesia bekerjasama dengan *Clean Urban Project*, RTI, Jakarta 1999.

kan bahwa tidak ada hubungan yang kuat antara tingginya produksi migas di suatu provinsi dengan besarnya penerimaan di daerah tersebut. Selain itu, dari estimasi terhadap PDRB perkapita nonmigas didapatkan bahwa provinsi bukan penghasil migas memiliki ketergantungan yang relatif rendah terhadap dana perimbangan, sedangkan daerah penghasil minyak dan gas justru sangat bergantung terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Sementara itu, pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) di Jawa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jauh lebih besar dibandingkan di luar Jawa. Hal ini disebabkan karena pusat perekonomian masih terpusat di Jawa sehingga potensi dan kapasitas serta sumber penerimaan, khususnya dari pajak daerah dan retribusi relatif jauh lebih besar dibandingkan di luar Jawa. Sementara itu, peran anggaran Pemerintah Daerah di luar Jawa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dana perimbangan jauh lebih besar dibandingkan di Jawa. Hal ini dikarenakan masih adanya daerah-daerah di luar Jawa yang memiliki potensi dan kapasitas serta sumber penerimaan yang relatif masih rendah dibandingkan di Jawa. Oleh karena itu, upaya untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan daerah dalam membiayai beban pengeluaran maka sangat bergantung pada dana perimbangan. Dengan demikian, pengaruh PAD di luar Jawa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui dana perimbangan jauh lebih besar dibandingkan di Jawa.

3) Belanja Rutin dan Pembangunan

Sebelum pelaksanaan desentralisasi 1995-2000, pengaruh belanja pembangunan lebih berperan besar dibandingkan rutin dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, baik di tingkat nasional dengan migas dan tanpa migas, di Jawa maupun di luar Jawa. Memasuki era desentralisasi selama kurun waktu 2001-2004, belanja rutin maupun pembangunan mengalami peningkatan cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan hasil estimasi, menunjukkan bahwa belanja pembangunan jauh lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

dibandingkan belanja rutin, baik sebelum desentralisasi maupun sesudah pelaksanaan desentralisasi. Adanya pengaruh negatif belanja rutin terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dikarenakan alokasi belanja tersebut cenderung relatif tidak produktif dibandingkan belanja pembangunan dalam mendorong kegiatan perekonomian daerah. Misalnya, alokasi dana untuk belanja pegawai, biaya perjalanan dinas dan pemeliharaan barang. Sementara itu, adanya pengaruh positif belanja pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah antara lain karena alokasi anggaran pembangunan lebih diprioritaskan pada sektor-sektor yang produktif, misalnya di bidang ekonomi yaitu transportasi, perdagangan, pengembangan usaha daerah, keuangan dan koperasi, pertanian dan kehutanan serta pertambangan dan energi, sedangkan di luar bidang ekonomi, alokasi belanja pembangunan lebih dititikberatkan pada sektor-sektor penyediaan fasilitas-fasilitas pelayanan dasar di bidang kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, perumahan dan permukiman serta jasa pelayanan umum. Dengan demikian, peran anggaran Pemerintah Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dari sisi belanja pembangunan jauh lebih besar dibandingkan rutin.

Melihat dari perbandingan komposisi belanja daerah, belanja pembangunan relatif lebih kuat pengaruhnya di tingkat nasional dengan migas dibandingkan nasional tanpa migas. Selain itu, setelah memasuki era desentralisasi peran Pemerintah Daerah di luar Jawa dalam mengalokasikan belanja pembangunannya jauh lebih besar dibandingkan di Jawa, sehingga dampak yang terjadi adalah peran anggaran Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sisi belanja pembangunan jauh lebih besar dibandingkan di Jawa. Sementara itu, sebaliknya justru Pemerintah Daerah di Jawa sejak pelaksanaan desentralisasi lebih banyak mengalokasikan belanjanya pada belanja rutin dibandingkan di luar Jawa, terutama untuk alokasi pengeluaran pegawai yaitu pembayaran upah/gaji. Hal ini dikarenakan selama pelaksanaan desentralisasi, di Jawa ditandai adanya pengalihan pegawai yang disertai pula dengan alih status pegawai pusat menjadi pegawai daerah maupun pengalihan status pegawai daerah menjadi pegawai di daerah lain

karena adanya pemekaran wilayah provinsi, kabupaten dan kota yang terjadi di Jawa. Oleh karena itu, pengaruh anggaran Pemerintah Daerah di Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja rutin berpengaruh negatif cukup besar dibandingkan di luar Jawa.

4) Keterbukaan Daerah

Keterbukaan dalam hal ini merupakan penjumlahan dari ekspor dan impor terhadap Pendapatan Produk Domestik Bruto. Keterbukaan daerah dalam semua model berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat kepercayaan 90%, 95% dan 99%, sedangkan hanya beberapa sebagian kecil dalam persamaan tidak mengalami signifikan.

Secara umum menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan desentralisasi peran keterbukaan daerah mengalami penurunan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal disebabkan antara lain; *Pertama*, apabila Pemerintah Daerah lebih memberi perhatian pada upaya meningkatkan penerimaan terutama dengan melakukan ekstensifikasi pajak dan retribusi maka beban pungutan yang akan dialami oleh pelaku usaha akan semakin besar dan distorsi yang ditimbulkan terhadap perdagangan sehingga dapat berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi daerah. *Kedua*, adanya penambahan jenis pajak dan retribusi akan memberi peluang pada semakin banyaknya bentuk-bentuk pungutan yang menimbulkan semakin beratnya beban pengeluaran pelaku usaha akibat meningkatnya biaya transaksi. Bagi daerah, hal ini akan menimbulkan *high cost economy* yang merugikan bagi kegiatan ekonomi, termasuk terhadap perdagangan daerah yang pada akhirnya berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi daerah. Di samping itu, dampak krisis ekonomi yang belum sepenuhnya pulih yang berdampak menurunnya peran keterbukaan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil estimasi, menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan desentralisasi peran keterbukaan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jauh lebih besar terjadi di Jawa dibandingkan di luar Jawa. Hal ini disebabkan karena dalam pola perdagangan antar pulau tampak adanya konsentrasi aliran barang dan

tenaga kerja dari luar pulau Jawa menuju Jawa. Kondisi ini merupakan implikasi langsung dari adanya konsentrasi industri di Jawa yang ditopang oleh ketersediaan infrastruktur pelabuhan dan keberadaan sumberdaya manusia (SDM) yang relatif lebih baik daripada di luar Jawa serta tingginya aliran barang ke Jawa juga dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk di Jawa. Selain itu, terkait dengan banyaknya pungutan-pungutan menjelang pelaksanaan desentralisasi, khususnya yang terjadi di luar Jawa. Misalnya, masalah jembatan timbang di Sulawesi Selatan. Setelah UU No 18/1997 diberlakukan, seluruh jembatan timbang di Indonesia dihapuskan. Namun beberapa waktu setelah tuntutan otonomi daerah marak di awal 1999, praktek jembatan timbang di beberapa daerah seperti Sulawesi Selatan mulai berjalan kembali. Tujuan dari jembatan timbang ini adalah untuk menjaga jalan dari kerusakan akibat truk-truk yang kelebihan muatan. Namun dalam prakteknya, ini menjadi ajang korupsi dan kolusi dari petugas, polisi, dan sopir truk atau pun pengusaha. Hal ini secara tidak langsung menambah biaya terutama barang pertanian yang didistribusikan (Simanjuntak, 2001:9-10). Dengan demikian, adanya penambahan biaya tersebut dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*) yang pada akhirnya justru dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

5) Investasi Daerah

Investasi daerah sebelum era desentralisasi 1995-2000 berpengaruh positif pada tingkat kepercayaan 90%, 95% dan 99% terhadap pertumbuhan ekonomi. Sejak era desentralisasi 2001-2004, pengaruh investasi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan, baik di tingkat nasional dengan migas dan tanpa migas, di Jawa maupun di luar Jawa.

Adanya penurunan pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah pada saat pelaksanaan desentralisasi, disebabkan antara lain (Tambunan, 2001:11): *Pertama*, kurang memadainya kewenangan pemberian ijin yang dilimpahkan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Misalnya Pemerintah Pusat masih mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan ijin investasi kendati beberapa Peme-

rintah Daerah ingin sekali menarik investor, namun kurangnya kewenangan mereka dalam hal pemberian ijin dapat berdampak buruk pada investasi daerah yang akhirnya berimplikasi pada rendahnya pengaruh investasi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. *Kedua*, Pemerintah Daerah cenderung menciptakan pungutan-pungutan daerah dengan tujuan meningkatkan penerimaan daerah yang justru dapat menimbulkan ekonomi biaya tinggi sehingga berdampak terganggunya aliran investasi yang masuk ke daerah tersebut, padahal peranan investasi daerah, khususnya investasi swasta memiliki peranan strategis sebagai pemacu utama pertumbuhan ekonomi daerah. *Ketiga*, tingginya biaya perijinan dengan tujuan meningkatkan penerimaan daerah yang justru dapat menghambat investasi sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil survei LPEM FEUI pada 2004 menunjukkan adanya biaya tambahan dalam ijin pendirian usaha baru. Rata-rata biaya yang dikeluarkan adalah berkisar 8,38 persen dari modal awal. Secara keseluruhan biaya tambahan perijinan terhadap modal awal di luar Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa (7,88 persen versus 9,58 persen). Berdasarkan hasil survei tersebut tidak dapat ditangkal biaya perijinan yang harus dikeluarkan oleh investor bila ingin membuka usaha baru di daerah.³ Hal ini karena banyaknya variasi ketentuan perijinan serta biayanya. Selain itu, dampak krisis ekonomi nasional yang masih berpengaruh buruk terhadap kondisi investasi daerah sehingga berimplikasi pada rendahnya peran investasi daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

6) Pertumbuhan Penduduk

Sebelum memasuki era desentralisasi 1995-2000, pertumbuhan penduduk pada semua model berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa apabila perekonomian ditandai dengan tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi maka akan memiliki tingkat modal per pekerja yang rendah dan karena itu akan berdampak pada penurunan tingkat pendapatan per kapita.

Memasuki pelaksanaan era desentralisasi selama kurun waktu 2001-2004, pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan cukup signifikan. Hal ini akan semakin berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Adanya kenaikan jumlah penduduk sejak era desentralisasi disebabkan antara lain adanya pemekaran-pemekaran yang terjadi di provinsi, kabupaten dan kota sejak pelaksanaan desentralisasi. Hal ini secara tidak langsung memicu adanya pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi. Selain itu, sejak pelaksanaan era desentralisasi ditandai dengan adanya peningkatan arus urbanisasi yang cukup tinggi, terutama di Jawa yang umumnya merupakan daerah perkotaan (Lewis, 2004:13). Dengan demikian, dengan semakin besarnya jumlah penduduk maka akan berdampak pada penurunan tingkat pendapatan per kapita.

7) Pajak Daerah

Sebelum pelaksanaan era desentralisasi selama kurun waktu 1995-2000, pajak daerah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional dengan migas dan tanpa migas, di Jawa maupun di luar Jawa. Adanya pengaruh negatif peran Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pajak daerah berkaitan dengan masalah pengaturan kewenangan pengenaan pemungutan pajak daerah yang dilakukan sebelum era desentralisasi, di mana kurang memberikan peluang kepada daerah untuk mengadakan pungutan terhadap pajak, sehingga kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengumpulkan dananya lewat pajak (*tax effort*) cukup rendah. Selain itu, pengaturan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah harus mendapat pengesahan dari pusat (Sidik, 2002a:4). Hal ini secara tidak langsung dapat berdampak pada rendahnya peran penerimaan daerah dari pajak daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya sehingga pada akhirnya berimplikasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, adanya dampak krisis ekonomi nasional yang belum sepenuhnya pulih sehingga berdampak pada masih rendahnya penerimaan dari pajak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sebelum pelaksanaan desentralisasi, ditan-

³ Studi LPEM-FEUI, *Cost of Doing Business*, 2004.

dai masih banyaknya jumlah pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan, Misalnya, sebelum UU No. 18 tahun 1997 disahkan, UU yang berlaku saat itu adalah UU No 11 Drt tahun 1957, untuk jenis pajak provinsi terdapat sebanyak 5 buah dan pajak kabupaten/kota sebanyak tidak kurang dari 20 jenis. Karena UU ini memberi kewenangan kepada daerah untuk “menggali dan mengembangkan jenis-jenis pajak baru” maka dalam prakteknya jumlah pajak daerah yang ada jauh lebih banyak dari itu, yakni sekitar 40 jenis (Sidik, 2002:4). Oleh karena itu, dengan adanya pungutan-pungutan pajak yang berlebihan dapat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Memasuki pelaksanaan era desentralisasi 2001-2004, peran pajak daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Adanya peningkatan peran pajak daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah selama era desentralisasi merupakan konsekuensi logis adanya tuntutan untuk merealisasikan secara konsisten pelaksanaan desentralisasi. Selain itu, setiap daerah dapat memobilisasi penerimaannya sendiri antara lain melalui pajak daerah dan retribusi daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pengeluaran daerah yang sudah menjadi kewajibannya.

Berdasarkan hasil estimasi, menunjukkan bahwa selama era desentralisasi pengaruh pajak daerah di luar Jawa sangat berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan di Jawa. Hal ini disebabkan pungutan pajak dan retribusi yang berlebihan yang terjadi di luar Jawa. Misalnya banyaknya perda yang masuk dalam kategori perda bermasalah yang pada akhirnya menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Oleh karena itu, tingginya semangat pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan asli daerahnya tersebut justru dapat menimbulkan distorsi terhadap perekonomian daerah.

Sementara itu, meskipun pendapatan asli daerah (PAD) di Jawa jauh lebih besar dibanding di luar Jawa, tetapi *tax effort*nya ternyata jauh lebih rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Daerah di Jawa belum secara maksimal memanfaatkan potensi yang tersedia (Simanjuntak, 2001:3). Oleh karena itu, upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

daerahnya melalui pengeluaran daerah yang dibiayai dari pajak daerah lebih rendah dibandingkan di luar Jawa.

SIMPULAN

Hasil studi mengenai pengaruh peran Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di era desentralisasi dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, berdasarkan hasil studi menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan desentralisasi selama periode 1995-2000, peran anggaran Pemerintah Daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif, baik di tingkat nasional, di Jawa maupun luar Jawa. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan dan memobilisasi anggaran penerimaan dan pengeluaran daerah yang ada. Hal ini disebabkan karena besarnya peran atau dominasi Pemerintah Pusat dalam menjalankan sistem pemerintahan, termasuk dalam mengatur dan mengendalikan anggaran Pemerintah Daerah, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.

Kedua, memasuki era desentralisasi selama kurun waktu 2001-2004, pengaruh anggaran peran Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik melalui sisi penerimaan maupun pengeluaran mengalami peningkatan dibandingkan sebelum era desentralisasi. Namun peran tersebut jauh lebih besar melalui sisi pengeluaran dibandingkan sisi penerimaan, baik di tingkat nasional, di Jawa maupun di luar Jawa.

Ketiga, sebelum pelaksanaan era desentralisasi 1995-2000, peran anggaran Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lebih besar melalui dana perimbangan dibandingkan pendapatan asli daerah (PAD). Memasuki pelaksanaan desentralisasi 2001-2004, peran anggaran Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan asli daerah (PAD) mengalami peningkatan, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dana perimbangan, terutama di tingkat nasional di luar Jawa. Selain itu, berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa setelah era desentralisasi, dampak dana perimbangan cukup signifikan

meningkatkan anggaran pemerintah daerah (APBD), tetapi tidak berdampak secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini disebabkan oleh belanja daerah yang masih dominan dalam komponen APBD terutama belanja Wrutin, kemungkinan birokrasi pemerintahan yang efisien, dan proses perencanaan pembangunan di daerah yang relatif masih rendah.

Keempat, selama era desentralisasi 2001-2004, peran anggaran Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengeluaran pembangunan maupun pengeluaran rutin mengalami peningkatan dibandingkan sebelum era desentralisasi. Namun, peran tersebut lebih besar melalui pengeluaran pembangunan dibandingkan pengeluaran rutin. Hal ini disebabkan karena alokasi belanja rutin cenderung relatif tidak produktif dibandingkan pengeluaran pembangunan dalam mendorong perekonomian daerah. Sementara itu, adanya pengaruh positif anggaran Pemerintah Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengeluaran pembangunan karena alokasi anggaran pembangunan lebih diprioritaskan pada sektor-sektor yang produktif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kelima, memasuki era desentralisasi selama kurun waktu 2001-2004, pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan sebelum era desentralisasi. Hal ini semakin berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan sebelum pelaksanaan desentralisasi, baik di tingkat nasional, di Jawa maupun di luar Jawa. Hal ini disebabkan karena adanya arus urbanisasi yang cukup tinggi dan adanya pemekaran-pemekaran beberapa daerah provinsi dan kabupaten/kota selama pelaksanaan era desentralisasi. Dengan demikian, semakin besarnya jumlah penduduk maka akan berdampak pada penurunan tingkat pendapatan per kapita.

Keenam, sejak era desentralisasi selama kurun waktu 2001-2004, peran investasi dan keterbukaan daerah berpengaruh besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional, di Jawa maupun di luar Jawa. Sementara itu, peran pajak daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah mengalami peningkatan sejak memasuki pelaksanaan era desentralisasi, namun masih relatif kecil dalam

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, baik di tingkat nasional, di Jawa maupun di luar Jawa.

Rekomendasi. 1) Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat seyogyanya membuat alokasi dana APBD lebih banyak ke pengeluaran pembangunan yang secara langsung berdampak pada peningkatan ekonomi lokal. Upaya yang dapat dilakukan adalah membuat birokrasi pemerintahan yang lebih efisien serta meningkatkan kontrol masyarakat terhadap penggunaan belanja pemerintah daerah untuk mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan korupsi serta perilaku *rent seeking*. 2) Untuk meningkatkan investasi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya tidak meningkatkan pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dengan dalih untuk peningkatan PAD. Upaya yang seharusnya dilakukan adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha sehingga mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya, yang pada gilirannya akan menyerap tenaga kerja lokal dan menjadi sumber pendapatan daerah. Pemerintah Daerah bahkan seharusnya memberikan insentif dan kemudahan bagi investor melalui kemudahan perijinan, perbaikan infrastruktur perekonomian serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia lokal. 3) Studi ini menggunakan data runtut waktu dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2004 sehingga peran anggaran pemerintah dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan. Hal ini mengingat keterbatasan data dan desentralisasi fiskal baru dilaksanakan tahun 2001. Oleh karena itu, perlu adanya studi lanjutan dengan menggunakan model estimasi persamaan simultan yang menggabungkan blok keuangan daerah dan blok perekonomian daerah untuk memperoleh hasil yang lebih dinamis dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bird and Vaillancourt. (2000). *Fiscal decentralization in developing countries*. Cambridge University Press.
- Barro, R. (1990). Government spending in a simple model of endogenous growth. *Journal of Political Economy*.

- NBER Working Paper Series No. 2588.
- Barro, R. and X. Sala-i-Martin. (1995). *Economic Growth*. McGraw-Hill,
- Cullis and Jones. (1992). *Public finance and public choice: analytical perspectives*. New York: McGraw-Hill International Edition.
- Gujarati, Damodar. (2003). *Basic econometrics*, 4th ed. New York: McGraw-Hill.
- Jin, Jing and Zou, Heng-fu. (2005). Fiscal decentralization, revenue and expenditure assignments, and growth in China. *Journal of Asian Economics* 16 1047-1064 Elsevier Inc.
- Kälin, Walter. (2001). *Guide to decentralization*. Swiss agency for development and cooperation SDC.
- Lewis, Blane. (2004a). *Indonesian local government spending, taxing and saving: an explanation of pre and post-decentralization fiscal outcomes*. Jakarta: World Bank.
- Lewis, Blane. (2004b). How many new taxes and charges have regional governments created under fiscal decentralization?. *Research Triangle Institute, North Carolina*.
- Lewis, Blane. (2002). *Revenue-Sharing And Grant-Making In Indonesia: The First Two Years Of Fiscal Decentralization*. Asian Development Bank Manila.
- Lewis, Blane and Chakery, Jasmin. (2004). *Desentralized Local Government Budgets in Indonesia : What Explains The Large Stock of Reserves?*. Jakarta: World Bank.
- Lewis, Blane and Chakery, Jasmin. (2004). Central development spending in the regions post-decentralisation. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Publisher Routledge, part of the Taylor & Francis Group Volume 40, Number 3.
- Mankiw, Gregory. (2002). *Macroeconomics*, 5th ed. Worth Publishers.
- Musgrave and Musgrave. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*. 5th ed. New York: Mc-Graw Hill.
- Mahi, Raksaka. (2001). *Fiscal decentralization : its impact on cities growth*. 17 th Pacific Conference of the regional science associated international, Portland Oregon, USA, June 30 - July 4
- Mahi, Raksaka. (2001). *Manajemen keuangan publik pada pemerintah daerah*. Diskusi Panel Nasional "Manajemen Keuangan Publik dan Akuntansi Sektor Publik di Era Otonomi Daerah". Jakarta. 19 September 2001.
- Oates, Wallace. (1993). Fiscal decentralization and economic development. *National Tax Journal*. Vol 46 no. 2 University of Maryland.
- Pindyck and Rubinfeld. (1998). *Econometric Model and Economic Forecast*. 4th ed. New York: McGraw-Hill.
- Rosalina, Puteri (2006). *Pemekaran: derita bagi sang induk*. Harian Kompas 24 Mei 2006. Jakarta.
- Rosen, Harvey S. (2005). *Public Finance*, 7th ed. New York: Mc-Graw Hill.
- Sidik, Machfud and Kadjatmiko (2002). *Indonesian's fiscal decentralization: combining expenditure assignment and revenue assignment*. Paper of Georgia State University, Atlanta.
- Sidik, Machfud. (2002a). *Perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi fiskal*. Yogyakarta.
- Sidik, Machfud. (2002b). *Format keuangan pemerintah pusat dan daerah yang mengacu pada pencapaian tujuan nasional*. Jakarta.
- Sidik, Machfud. (2002c). *Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah*. Orasi Ilmiah dengan thema "strategi meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui penggalan potensi daerah dalam rangka otonomi daerah". Bandung, 10 April 2002.
- Simanjuntak, Robert. (2001). *Kebijakan pungutan daerah di era otonomi*. Domestic trade, decentralization and globalization: a one day conference. Hotel Borobudur Jakarta 3 April 2001.
- Simanjuntak, Robert. (2002). *Transfer pusat ke daerah: konsep dan praktik di beberapa negara (dana alokasi umum: konsep dan prospek di era otonomi daerah)*, Jakarta.
- Tambunan, Manggara. (2001). *Prospek perdagangan domestik yang bebas dalam era desentralisasi*

tralisasi dan dampaknya atas pertumbuhan ekonomi daerah. Centre for economic and social studies (CESS), PRISM Project, The Asia Foundation.

Ter-Minassian, Teresa. (1997). *Fiscal federalism in theory and practice*. Washington DC: International Monetary Funds.

UNSFIR. (2001). *Aspirasi terhadap ketidakmerataan: disparitas regional dan konflik vertikal di Indonesia*. Jakarta.

Wooldridge, Jeffrey M. (2002). *Econometric analysis of cross sections and panel data*". MIT Press.

Zhang, Tao and Heng-fu Zou. (1998). *Fiscal decentralization, public spending and economic growth in China*. World Bank, policy research working paper No. 1608.

LAMPIRAN

Tabel 1. Hasil estimasi pengaruh desentralisasi fiskal dari sisi penerimaan dan pengeluaran terhadap pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah era desentralisasi

VARIABEL BEBAS	VARIABEL TIDAK BEBAS : PDRB PER KAPITA							
	1995-2000 Nasional (dengan Migas)	2001-2004 Nasional (dengan Migas)	1995-2000 Nasional (tanpa Migas)	2001-2004 Nasional (tanpa Migas)	1995-2000 Jawa	2001-2004 Jawa	1995-2000 Luar Jawa	2001-2004 Luar Jawa
Desentralisasi Fiskal Sisi Penerimaan	-0,2159***	-0,0113***	-0,2131***	-0,0027 ^(ts)	-0,1088***	-0,0099 ^(ts)	-0,2767***	-0,0066 ^(ts)
Desentralisasi Fiskal Sisi Pengeluaran	-0,0330*	0,0099***	-0,0337*	0,0051*	-0,0187***	0,0204 ^(ts)	-0,0295 ^(ts)	0,0017 ^(ts)
Keterbukaan	0,0479 ^(ts)	0,0135*	0,0474 ^(ts)	0,0192***	0,8195***	0,0645***	-0,0006 ^(ts)	0,0112 ^(ts)
Investasi Daerah	0,8556***	0,3190***	0,8229***	0,2993***	0,7661***	0,2448***	0,8672***	0,3348***
Pertumbuhan Penduduk	-0,0061***	-4,4181***	-0,0050***	-5,5049***	-0,0015*	-9,5836***	-0,0060**	-3,5418***
R ²	0,9996	0,9998	0,9996	0,9998	0,9999	0,9999	0,9995	0,9997
Adjusted R ²	0,9995	0,9998	0,9995	0,9997	0,9998	0,9999	0,9993	0,9996
Prob (F-statistic)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
DW Stat	1,4400	1,7064	1,5608	1,8618	2,0433	2,4935	1,5628	1,5516

Sumber : Hasil Print Out Komputer.

Keterangan : ***Signifikan pada 1 %, ** Signifikan pada 5 %, *Signifikan pada 10 %, ^(ts) Tidak signifikan

Tabel 2. Hasil estimasi pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah era desentralisasi

VARIABEL BEBAS	VARIABEL TIDAK BEBAS : PDRB PER KAPITA							
	1995-2000 Nasional (dengan Migas)	2001-2004 Nasional (dengan Migas)	1995-2000 Nasional (tanpa Migas)	2001-2004 Nasional (tanpa Migas)	1995-2000 Jawa	2001-2004 Jawa	1995-2000 Luar Jawa	2001-2004 Luar Jawa
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	-0,1266***	0,0040 ^(ts)	-0,0102***	0,0124***	-0,0251 ^(ts)	0,0280 ^(ts)	-0,0986***	0,0048*
Dana Perimbangan	0,1525***	0,0410***	0,1237***	0,0205 ^(ts)	-0,0410*	0,0112 ^(ts)	0,2203***	0,0365***
Keterbukaan	0,0376 ^(ts)	0,0117 ^(ts)	-0,0587***	0,0117 ^(ts)	0,7057***	0,0695**	0,1222 ^(ts)	0,0129 ^(ts)
Investasi Daerah	0,9397***	0,3072***	0,8857***	0,2773***	0,8561***	0,1790***	0,9479***	0,3156***
Pertumbuhan Penduduk	-0,0091***	-4,7568***	-0,0174***	-5,5429***	-0,0029*	-11,165***	-0,0141***	-4,0653***
R ²	0,9998	0,9998	0,9999	0,9999	0,9999	0,9998	0,9997	0,9999
Adjusted R ²	0,9997	0,9997	0,9999	0,9999	0,9998	0,9996	0,9995	0,9999
Prob(F-statistic)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
DW Stat	1,4507	1,8102	1,7217	1,9400	1,6455	2,0333	1,5962	1,6939

Sumber : Hasil Print Out Komputer

Keterangan : ***Signifikan pada 1 %, ** Signifikan pada 5 %, *Signifikan pada 10 %, ^(ts) Tidak signifikan

Tabel 3. Hasil estimasi pengaruh belanja rutin dan pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah era desentralisasi

VARIABEL BEBAS	VARIABEL TIDAK BEBAS : PDRB PER KAPITA							
	1995-2000 Nasional (dengan Migas)	2001-2004 Nasional (dengan Migas)	1995-2000 Nasional (tanpa Migas)	2001-2004 Nasional (tanpa Migas)	1995-2000 Jawa	2001-2004 Jawa	1995-2000 Luar Jawa	2001-2004 Luar Jawa
Belanja Rutin	-0,0369***	-0,0117 ^(ts)	-0,0071 ^(ts)	0,00047 ^(ts)	-0,0510 ^(ts)	-0,0201 ^(ts)	-0,0072 ^(ts)	-0,0095 ^(ts)
Belanja Pembangunan	0,0217 ^(ts)	0,0284***	0,0638***	0,0155***	0,0327 ^(ts)	0,0015 ^(ts)	-0,0867 ^(ts)	0,0173***
Keterbukaan	0,1793***	0,0108 ^(ts)	0,0577*	0,0131***	0,0922 ^(ts)	0,0664***	0,1302***	0,0101 ^(ts)
Investasi Daerah	0,5246***	0,2558***	0,5001***	0,2968***	0,6958***	0,1485**	0,4789***	0,3252***
Pajak Daerah	-0,3205***	0,0025 ^(ts)	-0,2725***	0,0027 ^(ts)	-0,1627***	-0,0287**	-0,3463***	-0,0351 ^(ts)
Pertumbuhan Penduduk	-0,0067***	-5,6591***	-0,0065***	-5,4815***	-0,0013 ^(ts)	-15,659***	-0,0074***	-3,6893***
R ²	0,9999	0,9980	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9996	0,9999
Adjusted R ²	0,9999	0,9972	0,9999	0,9999	0,9998	0,9999	0,9996	0,9999
Prob(F-statistic)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
DW Stat	1,8386	1,7230	1,9847	1,8343	1,5739	2,1768	1,7728	1,5353

Sumber : Hasil Print Out Komputer

Keterangan : ***Signifikan pada 1 %, ** Signifikan pada 5 %, *Signifikan pada 10 %, ^(ts) Tidak signifikan